

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai/PPN) and/or Luxury Sales Tax (Pajak Penjualan atas Barang Mewah/PPnBM) collection system as well as identify related risks appeared in PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. It is important because BUMN became mandatory of PPN and/or PPnBM collection based on PMK No. 85/PMK.03/2012. The subject in this study is PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, one of the biggest information and telecommunications company. This study was analyzed using descriptive evaluation method that is by examining the condition of the company through observation, interviews, and documentation. The general risk profile based on PER-16/PJ/2009, risk management techniques, and a nine-box matrix based on a significance level of impact and likelihood (Suprajadi et al, 2012), was used to identify risk assessment. The results showed that the implementation of PPN risk management in PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk is properly adequate. The risks currently faced by the company as the tax collector is the additional risk of tax liability if the tax collection process is not done properly.

Keywords: risk, corporate tax risk management, risk assessment, BUMN, and VAT collection process.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pemungutan PPN dan/atau PPnBM dan mengidentifikasi risiko terkait pemungutan PPN dan/atau PPnBM yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hal ini berkaitan dengan kembalinya BUMN menjadi wajib pungut PPN dan/atau PPnBM sesuai dengan yang tercantum dalam PMK Nomor 85/PMK.03/2012. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, salah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang informasi dan telekomunikasi. Peneliti mencoba melakukan analisis dengan menggunakan metode evaluasi deskriptif yaitu dengan cara memeriksa kondisi perusahaan saat ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu dalam melakukan *risk assessment* yang terjadi di perusahaan digunakan pula analisis profil risiko umum sesuai dengan PER-16/PJ/2009, teknik pengelolaan risiko, dan penilaian risiko dengan menggunakan *nine-box matrix* berdasarkan tingkat signifikansi *impact* dan *likelihood* (Suprajadi *et al*, 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko PPN di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk sudah memadai. Risiko yang saat ini dihadapi oleh perusahaan selaku pemungut pajak adalah adanya risiko penambahan kewajiban jika proses pemungutan pajak tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Kata kunci: risiko, *corporate tax risk management*, *risk assessment*, BUMN, dan proses pemungutan PPN.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	8
2.1 Kajian Pustaka	8
2.1.1 Fungsi Pajak.....	8
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.1.3 Dasar Hukum Penunjukan Pemungut/Pemotong Pajak.....	10
2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah..	16
2.1.4.1 Pengertian PPN dan/atau PPnBM.....	16
2.1.4.2 Subjek PPN dan/atau PPnBM.....	18

2.1.4.3 Objek PPN dan/atau PPnBM	21
2.1.4.4 Tarif PPN dan/atau PPnBM	24
2.1.4.5 Saat Terutangnya PPN dan/atau PPnBM.....	25
2.1.4.6. Tempat Pajak Terutang	26
2.1.5 Kewajiban Pemungut Pajak	27
2.1.6 Dasar dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan.....	28
2.1.7 Risiko Umum.....	30
2.1.7.1 Definisi Risiko	30
2.1.7.2 Klasifikasi Risiko.....	30
2.1.8 Manajemen Risiko	33
2.1.8.1 Definisi Manajemen Risiko	33
2.1.8.2 Siklus Manajemen Risiko	33
2.1.8.3 Sumbangan Manajemen Risiko terhadap Perusahaan	37
2.1.9 Penilaian Risiko	38
2.1.9.1 Definisi Penilaian Risiko	38
2.1.10 Risiko Perpajakan	38
2.1.10.1 Ragam dan Jenis Risiko Perpajakan	38
2.1.10.2 Risiko Pajak Berdasarkan Jenis Pajak	41
2.1.10.3 Risiko Pajak Berdasarkan Peluang SPT Diperiksa.....	43
2.1.10.4 Teknik Pengelolaan Risiko Perpajakan	46
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	49
 BAB III METODE PENELITIAN	 50
3.1 Gambaran Subjek Penelitian	50
3.1.1 Latar Belakang Penunjukkan Kembali PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk menjadi Pemungut Pajak	50
3.2 Teknik Pengumpulan Data	51
3.2.1 Jenis Riset	51
3.2.2 Kedalaman Riset.....	51
3.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	52
3.2.4 Lingkungan Riset.....	52

3.2.5 Unit Analisis	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Pembahasan.....	53
4.1.1 Analisis Perbandingan Ketentuan BUMN sebagai Pemungut PPN dari Masa ke Masa	53
4.1.2 Strategi PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dalam Menghadapi Risiko	55
4.1.2.1 Dasar Regulasi	56
4.1.2.2 Manfaat Strategi.....	57
4.1.3 Proses Risiko dalam Sistem Pelaporan PPN pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	57
4.1.4 Hasil Analisis Risiko Profil Umum PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk..	60
4.1.5 Hasil Pengelolaan Risiko PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	62
4.1.6 Penilaian Risiko pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk berdasarkan Tingkat Signifikansi <i>Impact</i> dan <i>Likelihood</i>	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS (<i>CURRICULUM VITAE</i>).....	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perubahan Peraturan Penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut PPN dan/atau PPnBM.....	2
Gambar 2.1 Tempat Pajak Terutang.....	26
Gambar 2.2 Tahapan Manajemen Risiko.....	36
Gambar 2.3 Klasifikasi Risiko Berdasarkan Jenis Pajak.....	41
Gambar 2.4 Klasifikasi Pajak Berdasarkan Peluang Diperiksanya SPT.....	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Objek Pajak yang Dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah.....	13
Tabel 2.2 Perbedaan antara Risiko dan Ketidakpastian.....	32
Tabel 2.3 Total Denda yang Harus Ditanggung oleh Wajib Pajak.....	42
Tabel 2.4 Penentuan Pemeriksaan dan Dokumen yang Wajib Dipinjamkan Berdasarkan Tingkat Risiko.....	44
Tabel 2.5 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	49
Tabel 4.1 Ketentuan Pemungutan PPN oleh Wapu BUMN dari Masa ke Masa.....	53
Tabel 4.2 Proses Risiko PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	59
Tabel 4.3 Analisis Risiko Profil Umum PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk...	60
Tabel 4.4 Tingkatan Risiko Pengusaha Kena Pajak.....	61
Tabel 4.5 Penilaian Risiko Berdasarkan Tingkat Signifikansi <i>Impact</i> dan <i>Likelihood</i>	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A 140 BUMN yang Terdaftar di Kementerian BUMN.....	74
Lampiran B Sistem Pelaporan PPN di PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.....	81